

**Islam dan Budaya Politik Melayu****Muhammad Abdillah**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang

muhammadabdillah@radenfatah.ac.id

**Abstract**

*This paper aims to examine the relationship between Islam and the Malay world which has been widely studied by experts and researchers. A special description of the contestation between Islam and Malay political culture as a form of open-minded society, to be able to see how Islamic and Malay political culture is in a simple way. This research departs from the questions: first, how is Islam in Malay history?; second, how is the dynamics of Islam and Malay political culture. In this paper, qualitative methods are used to clearly examine Islamic and Malay political culture. This paper also aims to show that Islam has an integral role in the history of civilization of the Malay world, besides that Islam also has strong credibility in relation to politics from various perspectives, not only from a religious point of view, but also from a scientific point of view. viewpoint. This research uses a descriptive qualitative approach to look at how to find literature data and interpret the data contained in reference sources and various supporting sources about the contribution of Islamic thought in the Malay world.*

**Keywords:** Political Culture, Islam, Malay

**Abstrak**

*Tulisan ini bertujuan mengkaji hubungan antara Islam dan dunia Melayu yang telah banyak dikaji oleh para ahli dan peneliti. Uraian secara khusus tentang kontestasi antara Islam dan budaya politik Melayu sebagai bentuk masyarakat yang berpikiran terbuka, untuk dapat melihat bagaimana budaya politik Islam dan Melayu secara sederhana. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan: pertama, bagaimana Islam dalam sejarah Melayu?; kedua, bagaimana dinamika Islam dan budaya politik Melayu. Dalam tulisan ini, metode kualitatif digunakan untuk menelaah secara jelas budaya politik Islam dan Melayu. Tulisan ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam sejarah peradaban dunia Melayu, selain itu Islam juga memiliki kredibilitas yang kuat dalam kaitannya dengan politik dalam berbagai perspektif, tidak hanya dari sudut pandang agama, tetapi juga dari sisi ilmiah. sudut pandang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk melihat tentang bagaimana mencari data kepustakaan dan menginterpretasikan data yang terdapat pada sumber referensi dan berbagai sumber pendukung tentang kontribusi pemikiran Islam di dunia Melayu.*

**Kata Kunci:** Budaya Politik, Islam, Melayu

**Latar Belakang**

Berbicara Melayu (Achadiati Ikram, 1985) tidak terlepas dari perbincangan tentang sebuah bangsa beretnik *Austro Asiatic*, di mana terdapat ratusan suku yang hidup dan berdiam di sepanjang semenanjung Melayu yang berada dalam wilayah perairan Nusantara. (Balwi, 2004) Melayu juga merupakan sesuatu yang tidak dapat ditentukan dalam dimensi ruang dan waktu, sehingga Melayu dapat menjadi sebuah identitas, suku, bangsa, dan masih banyak lagi yang terikat dengan kata Melayu itu sendiri, bahkan Melayu juga masuk dalam dimensi agama sebagaimana yang di sebutkan bahwa Melayu selalu identic dengan

agama Islam sehingga “*Tidak Melayu tidak Islam*”. Sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Hang Tuah bahwa Melayu tidak akan pernah hilang dari bumi, Melayu juga selama ini dikenal sebagai negeri yang bertuah dan beradat.

Melayu tidak memiliki budaya tersendiri, baik dalam rutinitas kehidupan sehari-hari yang melingkupi seluruh lini seperti dalam kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan politik. Eksistensi Melayu sangat dipengaruhi oleh budaya politik Melayu itu sendiri, karna budaya politik Melayu merupakan regenerasi kepemimpinan para penguasa untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan Melayu dalam menerima atau menolak, serta menyesuaikan sebahagian dari semua unsur yang datang dari luar dan yang telah ada dalam masyarakat Melayu sendiri.

Budaya Melayu sendiri tidak terlepas dari peranan dan sumbangsih dari Islam, di mana Islam memainkan peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Melayu, baik dari segi agama, adat dan budaya serta politik, budaya politik Melayu kemudian mengalami berbagai perubahan terutama disebabkan oleh datangnya imperialisme barat yang dengan kekuatannya menjajah dan menguasai wilayah-wilayah yang ada di semanjung Melayu terutama kawasan Nusantara. Sistem kolonial inilah kemudian turut bersaing dan mempengaruhi budaya politik Melayu. Dapat dilihat dari pola pemikiran politik masyarakat Melayu yang banyak mengacu kepada politik dengan sistem demokrasi yang ditawarkan oleh bangsa barat (Hakim,2017).

Keadaan tersebut terus berlanjut hingga pada 1957 dibuat suatu peraturan yang membedakan antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu. Sehingga orang Melayu memiliki hak istimewa dalam bidang agama, dan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa ibu bagi masyarakat yang hidup di tanah Melayu. Sehingga perlu dilihat bagaimana sistem budaya Melayu terutama dalam wilayah Nusantara yang dahulu lebih dikenal dengan nama Nusantara. Di mana dahulu sistem budaya yang ada di wilayah Melayu merupakan konsep kerajaan, kemudian berubah menjadi kesultanan pasca runtuhnya kerajaan-kerajaan yang ada.

Bentuk bangsa yang didominasi oleh sistem politik barat menjadikan kesultanan berdiri didalam berbagai bangsa dan negara-negara yang telah merdeka dari kolonialisasi penjajah, sebagaimana Indonesia dan Malaysia (Maryam, 2016). Kerajaan menjadi tema sentral dalam kajian budaya politik Melayu. Raja di tempatkan sebagai sumber dari segala sesuatu dan eksistensi dari kekuasaan politik, sehingga tindak tanduk masyarakat harus sesuai dengan apa yang telah dititahkan oleh paduka raja. Makalah ini ditulis untuk melihat bagaimana kerajaan dan kesultanan Melayu dihadapkan dengan ideologi-ideologi politik baru yang bawa oleh bangsa barat kedalam kehidupan masyarakat Melayu.

Perdebatan dan kontes ideologi menjadi hal yang menarik untuk dikaji, di mana sistem kerajaan dihadapkan dengan dua kekuatan ideologi lainnya yaitu sistem politik liberal yang lebih mengedepankan konsep kebangsaan dan negara, sebagai bentuk dari masyarakat Melayu bersatu, selanjutnya adalah sistem politik Islam yang menawarkan konsep keummatan sebagai bentuk sosial masyarakat. Kedua sistem politik ini merupakan musuh bagi sistem kerajaan yang pernah ada di wilayah Melayu Nusantara. Segi tiga ideologi politik dalam bangsa Melayu inilah kemudian mewarnai dalam budaya politik Melayu hingga saat ini.(WAMY, 1993)

Abad ke-19 merupakan abad di mana kemajuan intelektual di dunia melayu, terutama dalam bidang politik, pendidikan dan begitu juga ideologi. Jika dilihat dari lembar sejarah

terdapat dua ideologi yang berlaku dalam dinamika politik melayu pada saat itu, di antaranya adalah ideologi restorasi yang menginginkan sistem kerajaan dengan model baru, di mana kerajaan melayu baru yang di inginkan adalah berupa kerajaan yang lebih menekankan kepada sistem sosial dalam perpolitikannya, yang kedua adalah ideologi yang berpaham kepada status kebangsaan Melayu sebagaimana yang telah kemukakan oleh Abd Allah bin Abd al-Qadir.(Daniel Arif Budiman, 2010). Konsep kebangsaan ini kemudian menjadi suatu pandangan politik yang menjadikan Melayu sebagai sebuah bangsa dan negara. Kemudian konsep bangsa dan negara ini menentukan batas teritorial sebuah bangsa dan negara, hal ini lebih menjangkakan status sosial satu masyarakat melayu dengan lainnya.

Studi tentang Islam dan dunia Melayu selama ini cenderung melihat Melayu sebagai suatu peradaban tua di Nusantara, sebagaimana Junaidi (2020) melihat bagaimana Islam dan budaya menjadi suatu ikatan dalam masyarakat Melayu. Bahkan sebelum datangnya Islam Melayu telah memiliki beragam budaya, akulturasi Islam kemudian mewarnai kebudayaan Melayu (Huda, 2017). Sehingga Melayu selalu diidentikkan dengan Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat baik dalam hal ekonomi, hukum, pendidikan, politik, dan sosial budaya (Haryono, 2017; Mohd Zain, 2021; Rochmiatun, 2020). Tulisan ini lebih spesifik melihat bagaimana Islam memberikan kontribusi besar dalam bidang politik, bahkan politik melayu erat kaitannya dengan politik identitas yang terus terjadi dari masa ke masa (Jubba et al., 2021; Juhansar et al., 2021). Dengan demikian tulisan ini menjadi penting untuk melihat dinamika Islam dan politik masyarakat Melayu.

Tulisan ini ditujukan untuk melengkapi kekurang yang ada, dengan menganalisa bagaimana dinamika Islam dan budaya politik Melayu, sebagai sebuah konsekuensi dari kontestasi terhadap realitas sosial. Untuk itu, tulisan ini nantinya akan menjawab pertanyaan yang diajukan (1) bagaimana Islam dalam budaya politik Melayu); (2) bagaimana dinamika Islam dalam budaya politik melayu. Kedua pertanyaan tersebut menajdi jalan bagi usaha untuk memberikan penjelasan bagaimana Islam memainkan peran menjadi kekuatan yang menempatkan Islam sebagai subordinat dalam masyarakat Melayu.

Tulisan ini didasarkan pada suatu argument bahwa Islam dalam peradaban Melayu memiliki hubungan yang sangat erat dan menyatu dalam pentradisian masyarakat. Islam telah memberikan legitimasi atas setiap budaya yang ada di dunia Melayu. hal tersebut dimungkinkan oleh adanya sistem soial yang bersifat opensif terhadap sesuatu yang baru, selanjutnya dilestarikan dengan simbol-simbol kekuasaan politik yang melegitimasi alkulturasi antara agama dan budaya. Di satu sisi Islam tidak dibela oleh budaya Melayu, sedangkan di sisi lainnya tradisi dalam budaya Melayu sejalan dengan norma-norma kepatutan dalam ajaran Islam.

### **Metodologi Penelitian**

Artikel menggunakan pendekatan kualitatif berfokus pada library research untuk melihat bagaimana Islam hadir dan berkembang menjadi bagian politik Melayu serta melihat kontribusi yang diberikan pada khazanah keilmuan Islam. Sumber data didapatkan melalui pengumpulan data primer literature yang berkaitan dengan tema penelitian dari naskah, buku, dan artikel. Adapun sumber data sekunder didapat dari penelusuran yang difokuskan pada pengaruh Islam dalam dinamika politik di dunia Melayu. Selanjutnya data dianalisa dengan diuraikan secara spesifik dan terbuka untuk kemudian dihubungkan dengan tema penelitian

dan dideskripsikan secara sistematis sehingga mendapatkan kesimpulan dari tujuan penelitian ini, pada akhirnya hasil dalam penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pengetahuan yang mudah difahami dan dimengerti dengan sederhana.

### Hasil dan Pembahasan

Melayu adalah sebuah keunikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, hal itu dapat dilihat dari keseharian orang Melayu sendiri, bahkan mereka terkadang tidak menyadari atas kemelayuan tersebut. sehingga untuk menterjemahkan apa yang dimaksud dengan Melayu juga mengalami kesulitan tersendiri. (Zed, 2012) Dapat dilihat dari pengertian Melayu ada yang mengatakan bahwa Melayu adalah ras di antara ras yang ada, karakter dari ras Melayu sendiri diantaranya memiliki kulit yang berwarna coklat, warna ini adalah campuran dari ras Mongol, Dravida dan Aria. Jika melihat dari definisi ini maka sebagian besar dari wilayah Asia Tenggara adalah bagian dari ras Melayu, sedangkan selain daripada syarat-syarat tersebut kemudian disebut sebagai bukan-Melayu. kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Melayu adalah suatu Bangsa, yang menyebar dari di berbagai belahan dunia, seperti Madagaskar, Philipina, Malaysia, Singapura, Brunai Dar al-Salam, Thailand, dan Indonesia. Semuanya memandang bahwa Melayu adalah suku bangsa. Penyebaran suku Bangsa Melayu sendiri adalah akibat dari system politik yang mengakibatkan tersebarnya suku bangsa Melayu. Akan tetapi Melayu dalam konteks keindonesiaan berbeda dengan definisi tersebut tidak sama dengan Malaysia, Singapura dan negara-negara lainnya. (I. Abdullah, 2015)

Melayu dalam pengertian Indonesia adalah sekelompok orang yang memiliki adat istiadat Melayu, terutama bagi mereka yang tinggal dan menetap di wilayah Sumatera dan Kalimantan. (kbbi.kemdikbud.go.id, 2019) Sehingga suku bangsa lainnya dianggap bukan bagian dari Melayu, atau disebut juga non-Melayu. pengertian ini membedakan ras suku bangsa Melayu dengan yang lainnya seperti ras dari suku bangsa China, India, Eropa dan lain sebagainya. Selanjutnya Melayu dapat diartikan sebagai suku, di mana suku Melayu selalu menisbahkan diri mereka kepada suku Melayu, sehingga Melayu merupakan mereka yang memiliki suku Melayu sedangkan yang bukan dari suku Melayu bukan termasuk dari Melayu (Purwanto, 2012).

Selanjutnya Melayu juga diartikan sebagai Islam, di mana terdapat adagium yang mengatakan “*tidak Islam tidak Melayu*” hal ini disebabkan karna adat dan agama telah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga jika Melayu selalu identic dengan adat dan budaya yang Islami. Sedangkan orang-orang yang bukan Islam menempatkan diri mereka bagian dari Melayu kultur, di sebabkan mereka telah menyelaraskan diri mereka dengan kultur yang ada di wilayah Melayu itu sendiri. Dalam keseharian mereka menggunakan adat dan istiadat, serta menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari. Proses ini kemudian disebut Islam yang partikularistik. (Abubakar, 1981)

Sejatinya begitu banyak pengertian dari Melayu itu sendiri baik yang disebutkan oleh para ahli dari Barat ataupun Timur. Sehingga semakin banyak pengertian Melayu itu dijelaskan, maka akan semakin terlihat ketidakjelasan dari pengertian atas Melayu. contoh sederhana jika Melayu selalu identik dengan agama Islam apakah yang bukan beragama Islam bukan merupakan Melayu, walaupun mereka telah hidup dan menetap di wilayah

tersebut dalam tempo yang sangat lama, bahkan sebelum Islam sendiri hadir dan menjadi agama yang dianut di wilayah tersebut.(ed.) 2001)

Jika Melayu selalu diidentikkan dengan Islam tentunya hal tersebut merupakan suatu hal yang menyempitkan dari hakikat Melayu itu sendiri. Betapa tidak bagaimana masyarakat selain Islam atau yang tidak beragama sama sekali, hal inilah kemudian yang menyebabkan pengertian Melayu tersekat oleh sudut pandangan satu arah. Walaupun untuk melihat Melayu dapat dilihat dari berbagai aspek lainnya seperti, bahasa, geografi, etnik, agama, politik dan lain sebagainya. Terutama semenjak datangnya pandangan dari Barat, walaupun secara perlahan mempengaruhi eksistensi dari Melayu itu sendiri.

Pemahaman tentang identitas Melayu sendiri yang begitu banyak varian. Sehingga kesadaran tentang Melayu pada akhir-akhir ini semakin menjadi topik yang sangat menarik begitu banyak orang terutama tentang budaya dan politik dari Melayu itu sendiri. Salah satu hal yang dapat dilihat adalah bagaimana identitas sejarah Melayu dan sejarah identitas Melayu terbentuk, apakah dari budaya atau imbas dari politik yang terjadi dalam dinamika Melayu. Kebangkitan Melayu dilatar belakangi begitu banyak faktor diantaranya adalah kegelisahan yang menekan dan seakan menyingkirkan eksistensi Melayu.(Al-Attas, 1990)

Salah satu dari penyebab utamanya adalah globalisasi dan birokrasi yang selalu identik dengan politik, menyebabkan hal tersebut bersinggungan dengan aspek-aspek lain seperti sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan lainnya. Hal ini kemudian memunculkan perdebatan ideologi yang sejalan dengan perubahan sosial budaya dalam kekuatan politik. Perdebatan tersebut selanjutnya dilakukan oleh masyarakat Melayu sendiri untuk melahirkan pandangan budaya politik bagi masyarakat Melayu. Adapun budaya politik yang dilakukan dalam masyarakat Melayu sejatinya adalah untuk memberikan pengertian dan pemaknaan baru terhadap budaya politik yang lama. Kemudian berusaha untuk menggunakan budaya politik baru dalam masyarakat Melayu. (Azizy, 2003)

Politik dalam budaya Melayu bukan hanya sebatas institusi pemerintahan dan elit kekuasaan, seperti perilaku para raja-raja, sehingga budaya politik dalam dunia Melayu lebih dipahami sebagai wacana, hal ini pakai untuk melihat bagaimana pemahaman dan pengertian masyarakat Melayu terhadap kekuasaan dan ideologi politik, apakah budaya politik Melayu dipandang sebagai sesuatu tindakan yang memiliki peran besar dalam perkembangan budaya politik di dunia Melayu. Kondisi politik tersebut hadir dikarenakan adanya *civic humanism* oleh masyarakat dalam menempatkan diri pada perpolitikan dan kekuasaan, hal tersebut sebagai dasar terjadinya transformasi dari lahirnya otoritas negara dalam legitimasi kekuasaan.(Andrian, 1992)

Pembahasan tentang pengertian politik Melayu, dapat dikaji melalui teks-teks Melayu yang ditinggalkan oleh para generasi terdahulu dalam menjelaskan bagaimana budaya politik dalam dunia Melayu. Sehingga pemaknaan dan pengertian tentang politik Melayu memiliki begitu banyak dan berbeda-beda. Selayaknya sangat penting untuk melihat pandangan masyarakat Melayu, berkaitan dengan identitas dari Melayu itu sendiri. Begitu juga dengan dasar-dasar sosial yang ada dalam masyarakat Melayu, kemudian tiga jenis dari ideologi yang hadir dalam masyarakat Melayu yang mempengaruhi proses politik Melayu melahirkan diskusi yang menarik antara satu dengan yang lainnya terutama jika dilihat dari teks naskah Melayu yang ada.(Ahmad Sugiri, 1996)

## A. Ideologi Politik Melayu

Abdullah Abd al-Qadir (1787 M-1854 M) atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Munshi Abd Allah, beliau menulis tentang *Hikayat Abd Allah*. (Munsi, 2007) Kitab tersebut menggambarkan bagaimana ideologi Melayu mengalami tantangan yang besar terutama dalam persoalan ideologi kerajaan yang selama ini selalu identik dengan keabsolutannya. Hal tersebut dilakukannya disebabkan kedekatan dengan para kolonialisme yang datang ke dunia Melayu, sehingga dalam kajiannya Abd Allah seringkali mengkritik sistem kekuasaan politik kerajaan sehingga seringkali pandangan Munshi Abd Allah dikenal liberal. (Sweeney, 2005)

Dalam pandangan politik Melayu tersebut, dapat dilihat kebijakan-kebijakan dan tujuan dari politik Melayu harus mengalami perubahan baik dalam segi struktural maupun dalam kultural dalam politik Melayu yang baru. Abd Allah berpandangan bahwa kerajaan Melayu yang menjalankan politiknya dengan cara kejam serta ketimpangan keadilan bagi masyarakat Melayu. Karna dengan demikian kerajaan sama saja membunuh kreativitas dan keinginan masyarakat Melayu untuk lebih maju, sehingga sebab ketiranan tersebut masyarakat Melayu hidup dalam masa kebodohan dan pembodohan juga keterbelakangan akibat dari legitimasi kerajaan yang sangat mutlak. (Munsi, 2007)

Individualisme budaya, sosial dan politik dalam dunia Melayu mendorong agar adanya konsep tandingan bagi masyarakat Melayu untuk berhadapan dengan kekuasaan politik raja-raja Melayu, hal tersebut dikarenakan seringkali sistem politik kerajaan Melayu menerapkan status sosial dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi nama, gelar dan keturunan akan didapat dari sejauh mana mereka dekat dengan politik kerajaan. Sehingga dengan demikian para pengabdian tersebut dianugerahkan gelar kehormatan, budaya politik kerajaan Melayu seringkali menghapuskan usaha individu untuk ikut andil dan terlibat dalam dinamika perpolitikan di lingkungan kerajaan. Sehingga sistem politik tersebut penuh dengan ambisi dan hawa nafsu terutama dalam hal ekonomi, sistem tersebut selayaknya tidak berlaku dalam kehidupan masyarakat Melayu yang sangat dikenal humanisme. (Dault, 2005)

Ideologi politik yang dianut oleh kerajaan Melayu tentunya akan berimbas kepada sistem pendidikan, karna pendidikan merupakan aspek penting dari kehidupan manusia, di mana pendidikan adalah produk yang dilahirkan oleh kekuasaan politik, begitu juga dalam dunia Melayu pendidikan sejatinya merupakan cikal bakal terbentuknya potensi setiap individu terutama akal yang telah diberikan oleh Allah SWT. akan tetapi dalam budaya politik Melayu akal ataupun rasionalitas seringkali dikesampingkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, sehingga kekuasaan politik kerajaan memaksa akal masyarakat Melayu untuk tidak berontak terutama dalam hal yang berkaitan dengan pengetahuan, mereka hanya mendapatkan dogma turunan yang dibuat oleh sistem politik kerajaan, padahal akal pemikiran seharusnya mengugat semua hal tersebut dan berani mencoba keluar dari dimensi fanatisme buta untuk menemukan gagasan baru agar mendapatkan suatu perubahan besar pada tataran dunia Melayu. (Daniel Arif Budiman, 2010)

Dalam kajian politik Melayu, kerajaan Melayu memiliki kitab *Sejarah Melayu* merupakan naskah penting bagi ideologi politik kerajaan. Di mana digambarkan bahwa

raja merupakan seorang yang turun dari langit, dalam *Hikayat Dunia* hal tersebut tidak dapat dipercaya secara langsung, terutama bagi mereka yang menggunakan akalinya dalam memikirkan sesuatu, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan legenda dan mitos yang dapat diobservasi oleh akal dan fikiran bukan dijadikan sebagai dogma yang melahirkan fanatisme buta. (Ambary, 1998)

Dalam teks-teks kerajaan menyatakan bahwa dimensi kekuasaan seorang raja tidak memiliki batas, hal ini dikarenakan raja didirikan dari kharisma spiritual yang dinisbatkan terutama pada praktik upacara politik yang dilakukan oleh raja. Setelah kurang lebih setengah abad kemudian, sistem budaya politik Melayu mengalami formulasi ulang dan memberikan kontribusi dalam wacana politik Melayu, pandangan ini lebih cenderung kepada konsep bangsa. Di mana bangsa lebih identik dengan ras atau suku, walaupun keduanya selalu diarahkan kepada kesatuan politik dan etnis sehingga melampaui kesultanan Melayu yang ada seperti saat ini, di mana kesultanan Melayu berada dibawah kekuasaan politik bangsa dan negara. (Fadil, 1991)

Abd Allah Abd al-Qadir memberikan suatu keterangan yang keluar konsep politik dan ideologi kerajaan, selain mengenalkan konsep bangsa terdapat juga istilah lain yang digunakan seperti negeri, tanah air, dan watan, semuanya dapat diartikan sebagai bangsa, sebagai bentuk jati diri masyarakat Melayu. Istilah-istilah ini tentunya memiliki konsep tersendiri dalam budaya politiknya. Salah satu tujuannya adalah cikal bakal lahirnya sebuah konsep politik dalam nasionalisme. Karna kata bangsa bukan hanya tertuju kepada masyarakat tertentu dengan wilayah tertentu akan tetapi kata tersebut lebih kepada satu budaya politik yang telah ada dalam sistem pemerintahan.

Ideologi politik selanjut dalam masyarakat Melayu adalah ideologi agama, sebagaimana diketahui bahwa dalam masyarakat Melayu telah mengalami berbagai kekuasaan politik atas nama agama, seperti Hindu, Buddha, Islam dan lain sebagainya. Adapun dalam pembahasan kali ini ideologi dalam budaya politik Melayu berkaitan dengan agama Islam, sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa terdapat sebuah adagium bahwa "*tidak Islam tidak Melayu*" di mana konsep yang ditawarkan oleh politik agama dalam budaya Melayu tidak lain dan tidak bukan adalah konsep *syariah Islam* (hukum Islam) sebagai pegangan dalam budaya politik Melayu. (Azra, 2002)

Dalam aplikasi ideologi politik Melayu yang mengarah pada Islam menuntut semua rutinitas masyarakat disesuaikan dengan syariat Islam sebagaimana ummat muslim seperti mana biasanya. Konsep tersebut lebih dekat kepada ideologi politik kerajaan, dapat dilihat bagaimana konsep syariat Islam masuk dalam kesultanan-kesultanan di wilayah Melayu, terutama sekali kisaran abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Dimana rumusan ideologi politik Islam dirumuskan mencontoh kepada dunia Arab, terutama ketika para tokoh agama melakukan ibadah haji. Ideologi Islam merupakan ideologi yang menentang ideologi kerajaan, ideologi Islam di dunia Melayu selalu menjadi kritik terhadap ideologi kerajaan dan ideologi liberal, terutama ketika melihat kekuasaan yang ada di Melayu seringkali tidak menjalankan syariat Islam dalam pemerintahannya, (Ahmad et al., 2004)

Jika dalam ideologi kerajaan memperlihatkan kepemilikan terhadap materi yang banyak secara pribadi dan juga jabatan politik menunjukkan status seseorang dalam masyarakat Melayu itu sendiri. Dalam ideologi Islam semua itu hanyalah sebuah

kebodohan, sehingga ideologi politik Islam lebih kepada penekanan kepada konsep ilmu dan akal, sebagaimana tujuan dari ikhtiar mereka dalam mencapai kemuliaan. Konsep ideologi politik Islam tidak terlepas dari tiga rumusan yaitu *ummat*, *tarikh* dan *mursyid*, ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki ketersinggungan terhadap konsep liberal. *Ummat* merupakan rumusan dalam membangun masyarakat Melayu sebagai ganti dari ideologi kerajaan, perbedaan dari konsep bangsa yang ada dalam ideologi politik liberal yang mempunyai wilayah dan pilihan politik jelas, sedangkan konsep *ummat* lebih kepada sistem yang religius, dapat diterjemahkan bahwa *ummat* adalah masyarakat Melayu yang aktual dan potensial.

Konsep ideologi politik Islam bukan berarti menolak secara tegas dua konsep lainnya melainkan konsep tersebut lebih kepada penekanan ajaran-ajaran syariat Islam dalam setiap dasar-dasar pemerintahan masyarakat Melayu. Begitu juga dalam perkara *tarikh* lebih ditekankan kepada pergerakan masyarakat pada masa lalu, dipelajari dan dikaji sebagai bahan untuk menata masa saat ini dan akan datang, seperti pemikiran yang dikemukakan oleh kaum Islam modern seperti Muhammad Abduh dan lain sebagainya. Sehingga sejarah (*tarikh*) tidak semata-mata difahami sebagai risalah yang tersisa dari masa lalu, akan tetapi lebih kepada konsep evolusi untuk sejarah berkembang, nantinya akan menghasilkan sebuah konsep *tamadun*, konsep ini merupakan peradaban yang modernitas, berapa banyak contoh yang dilihat dari kemajuan tersebut tercapai oleh masyarakat diluar masyarakat Melayu.

Selanjutnya dalam konsep ideologi politik Islam dibutuhkan petunjuk untuk memecahkan semua masalah, untuk itu dibutuhkan *mursyid* atau dapat disebut sebagai tokoh-tokoh spiritual yang bijaksana, serta mampu mengajarkan kebijaksanaan dan pengetahuan, dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai para ulama yang selalu diidentikkan dengan pemimpin *ummat*. Sehingga ideologi Islam menekankan konsep pemerintahan untuk selalu dekat dengan para ulama, karna dari para ulama tersebut nantinya diharapkan dapat membawa transformasi bagi seluruh masyarakat Melayu. Ketiga hal ini, baik *ummat*, *tarikh* dan *mursyid* merupakan konsep penting dari ideologi Islam, dan ketiga hal tersebut juga yang membedakan ideologi Islam dengan ideologi kerajaan dan ideologi liberal. (Burhanuddin, 2017)

Selanjutnya setelah ideologi liberal dan ideologi Islam adalah ideologi kerajaan, di mana ideologi politik ini sangat berbeda seperti ideologi kerajaan zaman dahulu, konsep yang digunakan dalam ideologi kerajaan baru ini sangat jauh berbeda dari kerajaan sebelumnya, akan tetapi lebih kepada kedekatan ideologi liberal. Ideologi kerajaan ini menawarkan konsep bahwa kerajaan Melayu dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Melayu dengan cara membentuk perlembagaan yang modern, dan terbuka untuk menyambut bangsa asing untuk kepentingan masyarakat Melayu kedepannya. Adapun untuk istilah kerajaan kemudian diganti dengan menggunakan kata negeri untuk menunjuk sistem ideologi kerajaan, dan bangsa sebagai kata yang dipakai untuk masyarakat Melayu. Dan dua hal tersebut merupakan hal yang baru dan tidak ditemukan dalam catatan sejarah Melayu sebelumnya, dan keduanya tentu memiliki dimensi teritorial dan politik sebagai gambaran masyarakat Melayu secara menyeluruh. Selanjutnya adalah konsep *tawarikh* seperti konsep ideologi Islam yang menawarkan konsep *tarikh*, untuk melihat perkembangan masyarakat Melayu dalam kehidupan saat

ini dan yang akan datang. Dapat dilihat dari berdirinya institusi yang modern, sehingga jika berbicara tentang ideologi kerajaan Melayu yang baru ini akan lebih besar kepada ide dan modernitas dan lebih kepada wacana politik yang kuat dalam budaya masyarakat Melayu

. Ideologi kerajaan Melayu ini kemudian secara politik dapat disesuaikan dengan tuntutan waktu dan zaman. Sehingga secara tidak langsung sistem ideologi ini tidak meletakkan kekuasaan penuh kepada raja akan tetapi lebih kepada kosntitusi yang telah disepakati secara bersama, sehingga tidak ada perbedaan antara seorang raja dan masyarakatnya. Sehingga antara raja dan masyarakat dapat ikut serta dalam kontestasi politik. Ideologi kerajaan ini sangat erat hubungannya dengan ideologi liberal daripada ideologi Islam, bahkan begitu banyak dari konsep yang ditawarkan ideologi kerajaan ini jauh berbeda dari konsep Islam, sebagaimana tidak ada apresiasi dalam membangun masyarakat Melayu. Sehingga raja memiliki peranan selain sebagai raja juga sebagai pemimpin ummat.

Wacana tentang budaya politik Melayu dapat dilihat dari tiga ideologi yang sangat mempengaruhi system politik dan pemerintahan masyarakat Melayu. Di mana ideologi kerajaan, nasional, dan Islam hadir dengan konsep yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan ketiganya telah mengalami fase-fase dalam masyarakat Melayu. Terutama ketika masyarakat Melayu mencoba menegaskan sistem politik yang digunakan, dan ketiganya memperlihatkan perbedaan dan selalu membuka ruang untuk dialog dari ideologi politik lainnya, seperti zaman yang selalu menyesuaikan dan disesuaikan terutama setelah masuk abad ke dua puluh.

## **B. Dinamika Budaya Politik Melayu**

Jika berbicara Melayu salah satu yang tidak bisa lepas dibicarakan adalah paham teokrasi dan monarki, yang kemudian melahirkan perlawanan dari setiap ideologi yang ada, seperti jika terdapat masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap sistem kerajaan maka, tiada hukum lain yang diberikan kepada mereka adalah dihabisi baik secara individu hingga keturunannya, bahkan lebih para lagi adalah kediaman mereka akan dibalikkan, atas menjadi bawah, bawah dijadikan atas. Pada masa budaya politik Melayu menganut sistem kerajaan, sistem pemerintahan Melayu sebagai terbelakang dan penuh ketidakadilan, para raja-raja berlaku zalim, karna suara raja adalah suara tuhan.(Elly M. Setiadi Al, 2010)

Sistem kerajaan menjadikan budaya politik Melayu sewenang-wenang terhadap rakyatnya, kezoliman tersebut terus berlaku bahkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kemudian ketika kolonial datang sebagai imprealisme secara lambat laun merumuskan tentang identitas sejarah dan sejarah identitas sejarah dari Melayu itu sendiri, bahkan hingga hari ini status tersebut masih menjadi hal yang sangat abstrak untuk dipahami. Hal tersebut kemudian menruntuhkan ideologi kerajaan, dan mengubah sudut pandang bahwa Melayu bagian dari ras dan bangsa yang memiliki hak untuk ikut aktif dalam dinamika budaya politik Melayu.

Setelah budaya politik dengan sistem kerajaan tidak lagi menjadi penguasa penuh Melayu, digantikan oleh ideologi liberal identik dengan nasionalisme kebangsaan. Di mana konsep bangsa ini melahirkan adanya kesetaraan dalam diri setiap masyarakat Melayu. Doktrin kesetaraan tersebut menjadi barang yang istimewa dalam kehidupan

Melayu. Sehingga lahirlah berbagai pertikaian yang disebabkan penuntutan hak kesetaraan tersebut, terutama dari unsur yang menentang sistem terdahulu, dan sistem budaya politik yang sedang berlaku. Salah satu konsep yang ditawarkan oleh sistem budaya politik Melayu yang menganut sistem liberal ini, adalah agar Melayu menjadi bagian dari masyarakat sosial yang menganut prinsip kesamaan dalam semua hal.

Konsep liberal atau juga nasionalisme (*nation state*), adalah sebuah konsep negara modern, di mana kesetiaan masyarakat diberikan kepada bangsa dan negara, sebagai contoh sederhana yang terjadi di beberapa wilayah Nusantara salah satunya adalah Indonesia dan Malaysia yang mengusung kesamarataan dalam menuju suatu bangsa Melayu yang aman, damai, adil dan sejahtera. Sebagaimana dalam catatan sejarah Melayu pernah dipimpin oleh sistem politik kerajaan dan kesultanan, di mana tidak ada aturan hukum yang jelas dalam menentukan proses politik tersebut. Hal inilah kemudian menjadi ranah yang sangat rawan akan terjadinya perpecahan baik dalam lingkup pemerintahan ataupun dalam masyarakat Melayu itu sendiri.

Tidak mengherankan jika terdapat di wilayah Melayu mempunyai dualisme kepemimpinan, sebagaimana yang terjadi di kesultanan Palembang Dar al-Salam. Hal tersebut tentunya berimbas kepada pergantian tampuk kekuasaan, hingga pada masa Aria Kusuma mendirikan sistem kesultanan dalam memerintah wilayah Palembang dan menyatakan diri terlepas dari mataram. Sehingga dalam sistem ini nantinya adanya pemilihan generasi penerus yang sering disebut sebagai pangeran ratu, syarat untuk menjadi pewaris tahta tersebut tentunya adalah anak laki-laki dari garis keturunan sultan ataupun raja yang memimpin pada saat itu. Akan tetapi sistem politik ini juga tidak berlangsung lama karna ketika datangnya kolonial menggunakan pola *divide et impera* menghancurkan semua tatanan tersebut dari dalam. (Woelders, 1975)

Pada akhirnya sistem politik seperti ini menjadi berbagai macam varian, bahkan di Palembang sendiri pernah dibuat syarat untuk seseorang menjabat sebagai sultan, diantaranya adalah: beragama Islam, memiliki hubungan dari zuriat kesultanan, memiliki amanah dan terbukti seperti surat-menyurat, naskah, dan benda-benda peninggalan kesultanan, masyarakat mengenal dan mengetahui status mereka sebagai sultan, dapat menjadi pemimpin, dan mempunyai kepedulian yang tinggi bagi kesultanan. Syarat-syarat tersebut dalam dinamika politik Melayu Palembang masih berlaku hingga saat ini, di mana terdapat dua sultan yang menyatakan diri mereka sebagai pemegang kekuasaan penuh kesultanan Palembang, akan tetapi dalam otoritas budaya politik mereka tidak memiliki kekuatan karna berada dalam naungan pemerintahan yang bersiapat *nation state*.

Budaya politik tersebut kemudian membangun sebuah stuktur di mana kekuasaan politik dapat membangun struktur sosial, dan tentunya sangat berkaitan dengan budaya yang ada di wilayah tersebut. Terutama dari sistem nilai, ideologi, status sosial dan kepentingan yang berlaku dalam aplikasi keseharian masyarakat Melayu. Semua itu menjadi interaksi politik yang tidak dipisahkan dari kebudayaan politik masyarakat Melayu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan Weber bahwa terdapat tiga tipe dalam budaya politik yang harus dilihat dalam satu pemerintahan yaitu : otoritas secara tradisional, otoritas secara karismatik dan otoritas secara legal. (Weber, 2009)

Islam memiliki hubungan yang sangat erat dengan Melayu, hingga keduanya sangat sulit untuk dipisahkan. Walaupun belum ditemukan teori yang menyatukan keduanya secara pasti, hal ini disebabkan karena jika melihat dari Melayu sendiri, maka secara otomatis kita akan melihat sejarah dari Proto-Deutro Melayu yang telah ada bahkan kurang lebih 1500 sebelum masehi, sedangkan Islam baru hadir dan muncul kisaran abad ke-7 di jazirah Arab, dan masuk berkembang di wilayah Melayu pada akhir abad ke-7, walaupun ada juga yang mengatakan bahwa Islam hadir di tengah masyarakat Melayu pada abad ke-13 (Yakub, 2013). Kenyataan sosial yang terbangun oleh kolonial, membagi Melayu dalam beberapa bagian terlihat dari perjanjian *Tractat London* (1924) ketika itu wilayah Melayu sudah dikuasi penuh oleh dua kekuatan besar dari barat yaitu Inggris dan Belanda. Sehingga masyarakat Melayu yang berada dalam jajahan kolonial kemudian tidak berdaya dalam menentukan arah politiknya, hal tersebut menjadi budaya dalam berpolitik kebanyakan masyarakat Melayu hingga saat ini. Terlebih ketika terjadinya perang dunia ke-II, masyarakat Melayu bertambah tidak memiliki daya dan upaya terutama ketika Melayu sendiri dibagi menjadi beberapa negara, di mana negara-negara tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem pemerintahan liberalisasi dibawah kolonialisme. (Indera Gayatri and Kasiyanto Kasiyanto, 2009).

Untuk melihat klasifikasi budaya politik Melayu dapat dikategorikan dalam tiga jenis yaitu

a. Konstitusi

Budaya politik Melayu saat ini dapat dilihat dari masyarakat Melayu sendiri yang lebih banyak mengalami dinamika, akan tetapi masyarakat Melayu memiliki tatanan sendiri dalam menyelesaikan persoalan yang ada di dalam realitasnya. Termasuk didalamnya persoalan yang bersinggungan dengan politik Melayu seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, pertahanan dan politik itu sendiri. Latar belakang politik tentunya menjadi persoalan yang kompleks dalam masyarakat Melayu, di mana pilihan antara membela kepentingan Melayu sendiri dan kepentingan secara negeri dan negara, nantinya akan berkaitan dengan suku bangsa, begitu juga persoalan konstitusi yang ada di dunia Melayu, semua konsep yang dapat membenarkan akan menjadi pembelaan termasuk di dalamnya yang bersinggungan dengan etika, semunaya termaktub dalam konstitusi sebagaimana dilakukan oleh negara-negara barat. (Hutabarat, 2005)

Konstitusi budaya politik Melayu selalu identik dengan keIslaman, akan tetapi permasalahan yang hadir adalah kebanyakan masyarakat Melayu tidak memahami secara benar tentang Islam itu sendiri, hal ini dikarenakan konstitusi Islam ditulis dalam bahasa arab, sehingga ketika ajaran Islam diajukan untuk masuk dalam konstitusi negara, maka dengan mudah hal tersebut digugurkan atau ditolak, semua itu selalu dinomorduakan. Seperti yang terjadi di Indonesia masyarakat Melayu tidak memiliki hak politik sebagai Melayu, akan tetapi sebagai masyarakat dari sebuah negara, begitu juga dalam penyematian identitas Melayu, sangat jauh berbeda dengan yang ada di negara-negara Melayu lainnya, di mana jika berkaca dengan Malaysia dengan jelas mengatakan dalam konstitusinya bahwa siapa saja yang beragama Islam, menggunakan bahasa Melayu, dan hidup dengan adat dan istiadat Melayu, maka orang tersebut adalah Melayu (Ramadhan, 2018).

b. Politisasi

Budaya politik Melayu selanjutnya adalah politisasi terhadap masyarakat Melayu, di mana sebagai contoh Islam memiliki peran yang sangat besar dalam politisasi dalam dunia Melayu, (Rais, 2004) hal ini dapat dilihat bagaimana Islam memiliki kontribusi ketika mempolitisasi ummat untuk melakukan perlawanan terhadap kolonial asing yang datang menjajah wilayah Melayu, politisasi tersebut tentunya dengan mengelompokkan semangat jihad ummat Islam, bahkan jika menelusuri lebih dalam politisasi tersebut untuk mempertahankan eksistensi Melayu Islam di Indonesia, ketika perumusan Pancasila diselipkan kata “*kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya*”. Hal tersebut merupakan politisasi yang dilakukan untuk mempertahankan identitas keMelayuan Indonesia yang selalu lekat dengan keIslamannya. (A. ar-R. H. Abdullah, 1990)

Akan tetapi politisasi tersebut seperti tidak mendapatkan dukungan penuh dari kelompok yang menganut ideologi liberal, sehingga secara tidak langsung Islam secara jelas hilang dalam percaturan politik Melayu di Indonesia. Dari sinilah kemudian keMelayuan tersebut hilang secara perlahan dan bergantikan dengan politisasi secara kelompok, ada yang menyatakan diri sebagai kaum nasionalis, agamis, sosialis, komunis pribumi dan lain sebagainya, sedangkan budaya politik Melayu tidak lagi digunakan dalam kehidupan masyarakat Melayu sendiri. Adapun yang tersisa dari budaya politik Melayu saat ini adalah adat dan isitiadat yang masih dipertahankan keberadaannya, sehingga timbul suatu pertanyaan sampai kapan budaya tersebut dipertahankan oleh politik masyarakat Melayu.

c. Simbolisasi

Budaya politik Melayu terakhir adalah simbol, di mana simbol keMelayuan semenjak kerajaan, kesultanan, negara, selalu memiliki simbol tersendiri untuk membedakan antara masyarakat Melayu dengan non-Melayu. Akan tetapi simbol-simbol tersebut perlahan-lahan terkikis oleh kedatangan kolonial di dunia Melayu, sebagai contoh Singapura yang dahulu merupakan bagian dari Melayu, semenjak tahun 1819 perlahan-lahan berubah dan hilang simbol keMelayuan tersebut, hal ini disebabkan simbol tersebut selalu beriringan dengan simbol politik Melayu itu sendiri, ketika terjadi perundingan antara Sultan Johor dan Temenggung Husien, kemudian Rafles dengan upaya politik kolonial melakukan jual beli terhadap Singapore, secara tidak langsung peristiwa tersebut merupakan pelepasan Singapura dari dunia Melayu.

Simbol keMelayuan juga menjadi perebutan antar masyarakat Melayu sendiri, seperti yang terjadi di Kalimantan, ketika wilayah Borneo yang sangat identik dengan simbol keMelayuan kemudian dimasukkan ke dalam bagian Malaysia, secara tidak langsung melahirkan konflik antara Indonesia dan Malaysia, maka simbol Melayu sekali lagi diperebutkan dan dilepaskan dari Melayu (Jaelani Duski; Rochmiatun Jaelani; Ibrahim, 2019). Selain simbol Melayu dalam bentuk wilayah, masih banyak lagi simbolisasi Melayu lainnya, sebagaimana simbol-simbol keagamaan yang selalu melekat dengan Melayu. Seperti simbol yang ada di Singapura dahulu identik dengan syariat Islam, hingga saat ini masyarakat Melayu yang terus berjuang mempertahankan identitas Melayu mereka dalam budaya politik

adalah masyarakat Melayu Moro yang ada di Philipina, hal ini mereka lakukan karena mereka masih memegang teguh prinsip Melayu, dimana baik konstitusi, simbolisasi, dan politisasi mereka masih berpijak kepada identitas Melayu. (Hanafiah, 1995)

### **Kesimpulan**

Berbicara tentang Melayu merupakan suatu diskusi yang tidak memiliki kata awal dan akhir, karna Melayu memiliki begitu banyak pengertian dan makna, baik secara akademisi ataupun secara adat dan istiadat budaya, begitu juga perilaku kehidupan politik, setidaknya untuk melihat hal tersebut dapat dikaji melalui telaah sejarah baik dari masa kerajaan, kesultanan, dan hingga dalam bentuk negara (*nation state*). Sebagaimana Melayu sangat susah untuk didefinisikan, seperti itu juga dalam budaya politik yang berlaku dalam dunia Melayu. Untuk dapat melihat bagaimana budaya politik melayu secara sederhana dapat di bagi dalam tiga tipe ideologi yang sudah banyak tercatat dalam sejarah Melayu itu sendiri, di antaranya adalah ideologi kerajaan yang begitu lama menjadi system dalam pemerintah dunia Melayu, kedua adalah ideologi Islam (agama) pasca runtuhnya kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah melayu, masyarakat melayu menggunakan system politik Islam sebagai bentuk dari konsep pemerintahan, ketiga adalah ideologi liberal yang lebih identik dengan nasionalisme ataupun bangsa dan negara.

Studi ini dapat memberikan tambahan dalam kajian dibidang keilmuan yang mengkaji tentang sejarah dan peradaban terkhusus pada kajian Islamic studies terutama di dunia Melayu agar dapat lebih komprehensif, sejalan dengan hal tersebut, tulisan ini memperlihatkan bagaimana Islam telah memberikan kontribusi besar di sejarah masyarakat Melayu seperti simbolisasi dan politisasi yang disematkan pada Islam, dan Islam telah menjadi suatu ruh dan ilham dalam konstitusi-konstitusi masyarakat Melayu sehingga berdampak pada seluruh lini realitas sosial masyarakat di dunia Melayu. Oleh karena itu, studi ini menegaskan tentang perlu adanya suatu kajian mendalam terkait Islam dan Melayu beserta kontribusinya dalam sejarah peradaban Islam. Konteks ini diharapkan mampu untuk menjawab persoalan berkenaan dengan Islam dan Melayu.

Studi ini juga memiliki kekurangan di mana kajian yang dilakukan hanya terfokus pada Islam dan politik Melayu, sehingga studi ini hanya fokus membahas sejarah, pengalaman, kontribusi secara komprehensif pada berkembangnya. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan tentang pentingnya untuk melihat asal sejarah terhadap kontribusi yang ada dalam Islam sehingga dapat dilakukan suatu perbandingan baik antara Islam ataupun kelompok politik Melayu yang telah ada sebelumnya pada studi-studi yang lain, untuk melihat bagaimana khazanah keilmuan Islam yang begitu luas dengan kontribusi, pengalaman dan pengetahuan bagi ummat muslim

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, A. ar-R. H. (1990). *Pemikiran Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya Hingga Abad ke-19*. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Abdullah, I. (2015). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Pustaka Pelajar.

- Abubakar, H. R. H. Y. T. B. (1981). *Pengarang Melayu Dalam Kerajaan Riau dan Abdullah bin Abdul Munsyi Dalam Sastra Melayu*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Achadiati Ikram, D. (1985). *Kamus Melayu-Indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ahmad, K., Khair, M. Y., Penulis, T., Shariati, A., UII, M. S. I., Azizy, A. Q., WAMY, L. P. dan P., Abdullah, H., Rais, A., Indonesia, B. H. dan H. M. D. A. R., Shaleh, A. R., Haedari, A., Gadjahnata Sri-Edi, K. H. O. dan S., 2016, T. R. P. P. P. D. P. U. I. N. R. F. T., Yatim, B., Sunanto, M., Thohir, A., Triharyanto, B., Pulungan, J. S., ... Wargadalem, F. R. (2004). Sejarah Peradaban Islam. In *Millah: Vol. III* (1st ed., Issue 1). Rajawali Pers. <https://ppru.ac.id/2016/04/13/sejarah-dan-perkembangan-ppru/>
- Ahmad Sugiri, D. (1996). *Proses Islamisasi Dan Pencatutan Politik Umar Islam Di Indonesia*. Al-Qalam.
- Al-Attas, S. M. N. (1990). *Islam Dalam Sejarah Kebudayaan Melayu*. Mizan.
- Ambary, H. M. (1998). *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Logos Wacana Ilmu.
- Andrian, C. F. (1992). *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Tiara Wacana.
- Azizy, Q. (2003). *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani)*. Pustaka Pelajar.
- Azra, A. (2002). *Islam Nusantara: Jaringan global dan lokal*. Mizan Pustaka.
- Balwi, M. (2004). *Tradisi keilmuan dan pendidikan dalam tamadun melayu di Nusantara*.
- Burhanuddin, J. (2017). *Islam Dalam Arus Sejarah Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Daniel Arif Budiman. (2010). *Ideologi Politik Melayu Abad ke-19 :Studi Komparasi Pemikiran Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dan Raja Ali Haji*. Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Dault, A. (2005). *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional*. Pustaka al-Kautsar.
- Elly M. Setiadi Al, et. (2010). *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Kencana.
- Fadil, S. (1991). *Pengislaman Dunia Melayu: Transformasi Kemanusiaan dan Revolusi Kebudayaan. Dalam Dewan Budaya*.
- Hakim, L. (n.d.). HISTORIOGRAFI ISLAM MELAYU-NUSANTARA: Dari Sejarah Konvensional Menuju Sejarah Total. *Turast : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian; Vol 5, No 2 (2017)DO - 10.15548/Turast.V5i2.364*. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/article/view/364>
- Hanafiah, D. (1995). *Melayu Jawa Citra Budaya Sejarah Palembang*. PT Raja Grafindo Persada.
- Haryono, D. (2017). Kajian Kritis Pembentukan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten

- Siak. *Melayunesia Law*. <https://doi.org/10.30652/mnl.v1i1.4496>
- Huda, K. (2017). ISLAM MELAYU DALAM PUSARAN SEJARAH Sebuah Transformasi Kebudayaan Melayu Nusantara. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*.
- Hutabarat, R. (2005). *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.
- Indera Gayatri and Kasiyanto Kasiyanto, S. (2009). *Sejarah Pemikiran Indonesia Tahun 1967-1998*. Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata.
- Jaelani Duski; Rochmiatun Jaelani; Ibrahim, E. (2019). PEDAGANG MELAYU DI KESULTANAN SAMBAS 1819-1942: TERBANGUNNYA PERDAGANGAN, RELASI DAN JARINGAN. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol 15 No 2 (2019): Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 154–171.  
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/view/3787>
- Jubba, H., Rafi, M., & Qodir, Z. (2021). Politik Identitas Melayu Islam sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Berintegritas. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*.  
<https://doi.org/10.15575/politicon.v3i1.11481>
- Juhansar, Pabbajah, M., & Jubba, H. (2021). Relasi Agama dan Budaya dalam Tradisi Dui Menre' pada Pernikahan Masyarakat Bugis. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*.
- Junaidi, J. (2020). Islam dalam Jagad Pikir Melayu. *Buletin Al-Turas*.  
<https://doi.org/10.15408/bat.v20i2.3744>
- kbki.kemdikbud.go.id. (2019). *KBBI Daring*. 2016.
- Maryam, M. (2016). TRANSFORMASI ISLAM KULTURAL KE STRUKTURAL (STUDI ATAS KERAJAAN DEMAK). *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam; Vol 1, No 1 (2016): JUNIDO - 10.29300/Tjksi.V1i1.864*.  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/twt/article/view/864>
- Mohd Zain, Z. (2021). Budaya politik masyarakat Melayu: Satu analisis. *Malaysian Journal of Society and Space*. <https://doi.org/10.17576/geo-2021-1701-22>
- Munsiy, A. A. K. (2007). *Hikayat Abdullah*. Yayasan Karyawan.
- Nasution, Z. dan A. K. (2001). *Islam dalam Sejarah dan Budaya Masyarakat Sumatera Selatan*. Universitas Sriwijaya Press.
- Purwanto, B. (2012). Historisme Baru dan Kesadaran Dekonstruktif: Kajian Kritis terhadap Historiografi Indonesiasentris. *Jurnal Humaniora; Vol 13, No 1 (2001)DO - 10.22146/Jh.709*. <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/709>
- Rais, A. (2004). *Hubungan Antara Politik dan Dakwah*. Mujahid Press.
- Ramadhan, C. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; Vol 30, No 2 (2018)DO - 10.22146/Jmh.31169*.  
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/31169>

- Rochmiatun, O. O. E. (2020). Kearifan Budaya Lokal Dalam Naskah-Naskah Kuno di Uluan. *Tabuah*, 24(Vol. 24 No. 1 (2020)), 91–106.  
<https://www.rjfahuinib.org/index.php/tabuah/article/view/256>.
- Sweeney, A. (2005). *Karya Lengkap Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi*. Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Ecole francais d'Extreme-Orient.
- WAMY, L. P. dan P. (1993). *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya)*. Al Ishlahy Press.
- Weber, M. (2009). *From Max Weber: Essays in Sociology* (Noorkholish. (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Woelders, M. O. (1975). *Het Sultanat Palembang 1811-1852* (Vol. 72). Martinus Nijhoff.
- Yakub, M. (2013). HISTORIOGRAFI ISLAM INDONESIA: Perspektif Sejarawan Informal. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 37, No 1 (2013).  
<http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/94>
- Zed, M. (2012). *Budaya Lokal Melayu Dan Perubahan Peradaban Universal*. Badan kajian dan Penerbitan ICMi Orwil Sumsel.